

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dunia bisnis senantiasa berjalan secara dinamis untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Aktivitas bisnis merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang menciptakan dan mengalihkan nilai tambah ekonomi pada barang dan jasa di lingkungan bisnis sebagai bentuk pencapaian keuntungan dan distribusi pendapatan yang diharapkan merata bagi anggota masyarakat.

Pertumbuhan bisnis yang baik pada sektor perdagangan barang dan jasa perlu didukung dengan mapannya sektor moneter yang membantu sirkulasi permodalan untuk pertumbuhan dan kelancaran perdagangan barang dan jasa. Sirkulasi permodalan yang menstimulasi sektor riil ini harus dijaga kestabilannya sebagai upaya untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi yang baik.

Arus globalisasi telah menghadapkan pebisnis lokal untuk menyadari bahwa dewasa ini telah semakin bertambahnya pebisnis asing yang beroperasi di Indonesia hampir pada setiap sektor perdagangan barang dan jasa dengan segala keunggulan kompetitif atau mengedepankan keunggulan komparatifnya. Hal ini tentunya menjadi suatu tantangan besar bagi pebisnis lokal untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas usahanya dalam mengimbangi persaingan. Peningkatan kapabilitas dan produktivitas usaha ini tentunya perlu didukung oleh

permodalan yang memadai, terutama penyediaan modal kerja yang dewasa ini dapat diperoleh dengan dana kredit yang ditawarkan oleh bank.

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam proses menghimpun dana kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbal jasa tertentu, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh B. N. Ajuha (dalam Malayu S.P. Hasibuan, 2009: 2) yang menyatakan bahwa:

‘Bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik’.

Dari aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana inilah dapat terlihat bahwa bank sebagai bagian dari sektor moneter mampu menjaga dan memberikan kontribusi nyata dalam menggerakkan roda perekonomian di sektor riil. Dalam rangka menjaga keberlangsungan peran bank untuk membantu pebisnis lokal yang belum sempat menerima bantuan dana kredit, tentunya penting bagi bank untuk menjaga kelancaran dana kredit yang digulirkan pada debitur dengan menarik kembali pokok dana kredit tersebut untuk kemudian digulirkan pada penyaluran kredit tahapan selanjutnya.

Penyaluran kredit kepada masyarakat memberikan kontribusi pendapatan bagi pihak bank sebesar 70% hingga 90% jika pengelolaan kredit ini dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan serta SOP (Standar Operasional dan Prosedur) yang berlaku. Setiap teknis tindakan yang dilakukan oleh pihak bank

diarahkan agar bank mampu mencapai target laba operasi untuk setiap periodenya dengan memelihara kualitas dari kredit yang diberikan kepada debiturnya.

Kualitas kredit mencerminkan keadaan pembayaran pokok dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan. Kualitas kredit dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: (1). faktor intern bank pada saat tahap awal analisis permohonan kredit, persetujuan kredit, hingga tahap penagihan pokok dan bunga kredit; (2). faktor intern debitur dalam bentuk itikad baik, kepatuhan, dan kemampuan melakukan angsuran pokok dan bunga kredit; dan (3). faktor makro ekonomi suatu negara yang mampu mempengaruhi kondisi dan stabilitas bisnis yang dijalankan oleh debitur pada sektor riil, seperti dengan tingkat inflasi yang tinggi.

Menurut kualitasnya, kredit dapat dikelompokkan sebagai kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengelompokan kualitas kredit ini didasarkan penilaian bank pada tiga aspek yang meliputi aspek prospek usaha debitur, aspek kondisi keuangan debitur, serta aspek kemampuan membayar atas pokok dan bunga kredit.

Terdapat beberapa keuntungan dengan terpeliharanya kualitas kredit tergolong lancar. Pertama, dominannya kualitas kredit lancar berarti bank telah berhasil dalam menarik kembali pokok kredit yang disalurkan pada tahap pertama pengguliran dana bagi sektor riil, dampak lainnya seperti bank akan mendapatkan penerimaan yang signifikan dari bunga kredit. Penarikan pokok kredit ini tentunya memudahkan bank untuk melakukan pengguliran kredit pada tahap kedua, dan tahap-tahap selanjutnya yang memberi keuntungan secara berkelanjutan dalam

jangka panjang berupa selisih bunga pinjaman dengan bunga simpanan (*spread*) dalam beberapa tahapan pengguliran dana kredit. Kedua, dominannya kualitas kredit tergolong lancar berperan dalam menekan lonjakan nilai cadangan penyisihan kerugian kredit yang disisihkan untuk setiap periode pelaporan keuangan bank. Ketiga, banyaknya kredit dengan kualitas lancar secara langsung mengindikasikan bahwa bank telah berhasil memelihara likuiditasnya dan menjaga kecukupan modal sehingga hal ini akan turut mempertahankan kepercayaan masyarakat penyimpan dana dalam rangka menjaga *going concern* bank tersebut.

Dominasi kualitas kredit tergolong lancar diupayakan agar tetap berada pada rentang persentase lebih dari 95% yang dihitung menurut baki debit dana kredit, sebaliknya pihak bank akan mengupayakan agar persentase kualitas kredit tergolong bermasalah diupayakan tetap berada pada rentang persentase kurang dari 5%.

Likuiditas bank yang sehat dipengaruhi oleh kualitas kredit tergolong lancar yang membantu bank dalam melakukan penyesuaian dalam membayar bunga simpanan kepada nasabah penyimpan dana. Apabila kemampuan bank untuk membayar bunga simpanan terhambat karena meningkatnya kualitas kredit tergolong bermasalah dengan keterlambatan penerimaan bunga kredit maka pihak bank harus mengupayakan pembayaran bunga simpanan dari sumber-sumber lainnya.

Pertimbangan dalam mempertahankan kualitas kredit perlu diimbangi dengan gencarnya pemasaran kredit bagi pebisnis mikro atau calon debitur dari

kalangan rumah tangga. Saat ini begitu banyak bank umum yang tengah bersaing dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam memasarkan produk kreditnya. Pada saat banyaknya anggapan bahwa akses kredit pada bank umum relatif sulit, beberapa anggota masyarakat menangkap kesempatan pendanaan yang ditawarkan BPR sebagai bagian penting dari lembaga keuangan yang membantu berputarnya roda perekonomian masyarakat, terlebih bagi pelaku bisnis yang tergolong memiliki usaha skala mikro yang telah merasakan manfaat kemudahan dalam memperoleh fasilitas kredit dari BPR. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah kredit yang digulirkan oleh BPR secara nasional pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (Dalam Milyar Rupiah)**

<b>Indikator</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
LDR(%)	82,00	87,37	80,03	82,54	79,61
Total Kredit	14.654	16.953	20.684	25.480	28.012
Penghimpunan Dana	15.345	17.879	21.696	25.944	29.496
Modal Inti	2.525	1.525	4.149	4.926	5.961

Sumber: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) (data diolah)

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat perbandingan pinjaman terhadap tabungan (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) memperlihatkan peningkatan yang signifikan meskipun pada 2009 secara persentase menurun menjadi 79,61% dari persentase LDR 2008 sebesar 82,54% akan tetapi nilai ini masih tetap tergolong besar mengingat jumlah kredit yang disalurkan berjumlah Rp 28.012 milyar dan total penghimpunan dana sejumlah Rp 29.496 milyar.

Pentingnya menjaga kualitas kredit agar lebih banyak kredit yang tergolong berkualitas lancar tentunya menjadi tantangan dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan kredit pada suatu bank. Sebagaimana

yang dipaparkan di atas bahwa kualitas kredit tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yang meliputi faktor intern bank, faktor debitur, dan faktor makro ekonomi, dalam penelitian ini peneliti mempertimbangkan untuk melakukan analisis pada faktor intern bank saja mengingat faktor debitur dalam mempengaruhi kualitas kredit berada pada wilayah analisis yang dipegang oleh manajemen bank dengan standar ukuran kuantitatif dan kualitatif khusus yang dirancang oleh masing-masing bank bukan pada wilayah analisis yang dilakukan oleh pihak diluar manajemen bank, kemudian faktor ketiga yakni faktor makro ekonomi merupakan faktor yang cakupannya tergolong luas dan belum memiliki standar ukuran resmi bagi kualitas kredit yang ditentukan oleh otoritas perbankan yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang berasal dari kalangan akademisi.

Pada faktor intern bank, peneliti menilai kualitas kredit yang baik sebagai pencerminan kondisi yang baik pula atas kredit sebagai aktiva produktif bank yang memberi kontribusi besar terhadap pendapatan operasional perusahaan. Secara berkala bank harus memastikan bahwa kredit yang telah disalurkan tetap terpelihara dan sebagian besar tergolong dengan kualitas kredit yang lancar, dalam hal ini bank harus merancang dan memelihara bentuk pengendalian intern pengelolaan kredit yang tergolong memadai sebagai upaya untuk melindungi kredit sebagai aktiva perusahaan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan James A. Hall (2001: 150) bahwa:

Pengendalian intern merangkum kebijakan, praktik, dan prosedur yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai empat tujuan utama: untuk menjaga aktiva perusahaan, untuk memastikan akurasi dan dapat diandalkannya catatan dan informasi akuntansi, untuk mempromosikan



efisiensi operasi perusahaan, dan untuk mengukur kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen.

Hubungan pengendalian intern dengan kualitas kredit sebagai representasi aktiva produktif bank juga ditegaskan dalam pernyataan pengendalian intern yang disampaikan oleh Mulyadi (2001: 163) bahwa:

Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Penelitian pendahuluan yang dipaparkan dalam jurnal oleh Zaini Widya dan Sucipto (2009) yang telah meneliti tentang pengendalian intern sebagai alat dalam meningkatkan kualitas kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Putri Hijau Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian intern kredit yang dilaksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. Cabang Putri Hijau Medan dapat meningkatkan kualitas kredit yang dibuktikan dengan nilai kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang berada di bawah 5%.

Sementara itu penelitian lain yang dilaksanakan oleh Budi Prijanto dan Dessy Puspitasari (2005) yang meneliti tentang efektivitas struktur pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit investasi studi kasus pada PT. Bank Eksekutif Internasional (Persero) Tbk. Cabang Kelapa Gading. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh pengendalian intern terhadap prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Eksekutif Internasional (Persero) Tbk. Cabang Kelapa Gading dinilai baik, hal ini tercermin dengan diterapkannya suatu pedoman sebagai suatu acuan bagi pegawai Bank Eksekutif dalam proses pemberian kredit,

berisi serangkaian prosedur yang harus dilaksanakan dalam proses permohonan kredit calon nasabah.

Kemudian penelitian yang dilaksanakan oleh Woro Sasmitaningtyas (2005) yang meneliti tentang evaluasi sistem pengendalian intern pemberian kredit studi kasus pada BPR BKK Kraden Menden Blora. Peneliti telah menyimpulkan bahwa BPR BKK Kraden Menden Blora telah memiliki sistem pengendalian intern yang cukup mampu menjamin dipatuhinya kebijakan perusahaan. Pengendalian intern yang ditempuh oleh BPR BKK Kraden Menden Blora telah mendukung praktik yang sehat dalam pemberian kredit antara lain dengan menciptakan prosedur yang mampu melindungi kekayaan perusahaan dan menjamin prosedur tersebut dapat dilaksanakan seluruh komponen perusahaan. Namun demikian, peneliti menilai bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan atas struktur pengendalian tersebut, antara lain dilihat dari unsur praktik dan prosedur pencatatan terdapat kelemahan yang perlu diperhatikan seperti dokumen utama dalam proses pemberian kredit belum bernomor urut cetak.

Pengendalian intern pengelolaan kredit mengusahakan agar kredit yang disalurkan tetap berada pada kualitas kredit yang lancar, mencerminkan bahwa bank telah melakukan operasi yang benar (efektif) dan dengan cara-cara yang benar pula (efisien). Nilai NPL (*Non Performing Loan*) yang merupakan kelompok kredit tergolong bermasalah harus dikendalikan, apalagi jika melebihi batas 5%, merupakan kondisi yang harus diwaspadai oleh bank karena batasan tersebut menunjukkan jumlah kredit bermasalah yang signifikan bagi operasional



bank. Terkait dengan nilai NPL yang cukup besar bagi BPR, berikut akan ditampilkan contoh pada tabel 1.2 sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Non Performing Loan Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan**  
**Kecamatan (BPR LPK) Kabupaten Majalengka**  
**untuk Periode 31 Desember 2010**

No.	PD. BPR LPK	Jumlah Kredit Bermasalah	Nilai NPL
1	Cingambul	Rp 541.027.600,00	18,57%
2	Banjaran	Rp 456.579.250,00	20,80%
3	Cigasong	Rp 835.751.150,00	9,75%
4	Panyingkiran	Rp 570.911.500,00	8,60%

Sumber: Biro Industri, Perdagangan, dan Penanaman Modal Pemprop Jabar (Data Diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk keempat kecamatan di Kab. Majalengka yang diwakili oleh Kec. Cingambul, Kec. Banjaran, Kec. Cigasong, dan Kec. Panyingkiran memperlihatkan nilai NPL yang berada di atas nilai 5% sehingga nilai NPL ini termasuk kategori yang tidak baik untuk penilaian kesehatan bank. Hal ini mengindikasikan bahwa BPR LPK yang terdapat di Kab. Majalengka untuk periode tersebut menghadapi masalah dalam penanganan kualitas untuk kredit sehingga potensi munculnya kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet menjadi lebih signifikan. Banyaknya kredit yang tergolong bermasalah ini terjadi karena beberapa faktor. Faktor penyebab dari intern bank seperti proses evaluasi permohonan kredit yang tidak sesuai dengan prosedur evaluasi sehingga berpeluang meloloskan permohonan kredit yang tidak layak, kurang utuhnya proses analisis terhadap resiko kredit sehingga menimbulkan peluang gagal bayar bagi calon debitur yang memiliki tingkat resiko tinggi, hingga kurang efektifnya sistem penagihan pokok pinjaman

yang dilakukan oleh BPR LPK tersebut yang turut menyebabkan membengkaknya kualitas kredit tergolong bermasalah.

Terkait dengan pengkondisian kredit agar tetap mencerminkan kualitas kredit yang baik, Suhardjono (2003: 259) menjelaskan bahwa "...pencegahan kredit bermasalah harus dimulai dari orang nomor satu di bank yang bersangkutan dan secara bersamaan juga ditentukan oleh budaya pemberian kredit (*lending culture*)...". Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pimpinan bank memegang peranan penting dalam membimbing pegawai bank untuk memiliki budaya kerja dan gaya operasi perkreditan yang baik di bank tersebut. Pentingnya pembentukan budaya kerja dan gaya operasi yang mendukung pengelolaan kredit mencerminkan bahwa keberadaan pengendalian intern pengelolaan kredit memang mutlak perlu dimiliki oleh BPR karena filosofi yang dicerminkan oleh gaya operasi merupakan bagian yang melekat pada salah satu komponen pengendalian intern pengelolaan kredit.

BPR yang mampu menerapkan pengendalian intern pengelolaan kredit yang memadai tentunya akan mampu menekan timbulnya resiko yang disebabkan oleh banyaknya kualitas kredit yang tergolong bermasalah. Pengendalian intern pengelolaan kredit yang memadai dibentuk dengan sinergitas dari kelima komponen pengendalian intern yang meliputi: lingkungan pengendalian, penetapan resiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pengawasan. Ketika seluruh fungsi organisasi yang terdapat di BPR telah mampu melaksanakan dan mengorganisasikan secara proporsional pengendalian intern pengelolaan kredit maka hal ini merupakan awal dari tercapainya salah satu tujuan

pengendalian intern pengelolaan kredit yang diterapkan di BPR yakni proses pengumpulan kembali kredit dapat terlaksana secara efektif dan efisien sehingga mencerminkan kondisi kredit dengan kualitas yang baik.

Namun demikian, jika BPR tidak mampu untuk memelihara dan mengaplikasikan pengendalian intern pengelolaan kredit yang memadai dengan mengharmonisasikan kelima komponen pengendalian intern pengelolaan kredit dan tercapainya tujuan pengendalian intern pengelolaan kredit maka hal ini akan menyebabkan meningkatnya resiko yang ditanggung BPR terutama resiko dengan banyaknya kualitas kredit yang tergolong bermasalah yang mengancam likuiditas, profitabilitas, dan keberlanjutan pengguliran dana kredit bagi sektor riil untuk tahapan selanjutnya.

Oleh karena itu, mengingat begitu pentingnya pengendalian intern pengelolaan kredit terhadap kualitas kredit di BPR, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern Pengelolaan Kredit terhadap Kualitas Kredit di Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan (BPR LPK).(Survey pada BPR LPK yang terdapat di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pengendalian intern pengelolaan kredit Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan?

2. Bagaimana tingkat kualitas kredit Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan?
3. Bagaimana pengaruh efektivitas pengendalian intern pengelolaan kredit terhadap kualitas kredit Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh efektivitas pengendalian intern pengelolaan kredit terhadap kualitas kredit Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan yang terdapat di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

1. untuk memperoleh pemahaman efektivitas pengendalian intern pengelolaan kredit Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten.
2. untuk mengetahui tingkat kualitas kredit Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten.
3. untuk mengetahui pengaruh efektivitas pengendalian intern pengelolaan kredit terhadap kualitas kredit Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Aspek Akademis**

Kegunaan penelitian pada aspek akademis dari temuan hasil penelitian yaitu memberikan gambaran dan pemahaman yang signifikan bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lain, menyempurnakan dan mendalami kajian spesifik pengaruh efektivitas pengendalian intern pengelolaan kredit terhadap kualitas kredit Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten.

### **1.4.2 Aspek Praktis**

Pada aspek praktis, penelitian ini berguna untuk memberikan beberapa rekomendasi dan masukan yang konstruktif bagi Bank Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan di Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten dalam mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern pengelolaan kredit yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kualitas kredit bank.